



## Kompleksitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Perspektif Standar Nasional PAUD

Dikki Zulfikar Mahmudin  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia  
dikkiainpurwokerto@gmail.com

Novan Ardy Wiyani  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia  
fenomenajiwa@gmail.com

### *Abstract*

*The Complexity of Early Childhood Education (PAUD) Service Delivery in the Perspective of the National PAUD Standards. This study aims to explore the challenges and actions taken in implementing PAUD services in accordance with national standards at PAUD Waluyo Jati Gumelem Kulon, Susukan District, Banjarnegara Regency. The language is objective, formal, and unbiased. The text is free from grammatical, spelling, and punctuation errors. It is case study research that utilized interviews, observations, and documentation as data collection methods. The Miles and Huberman model data analysis technique was employed, including data reduction, data display, and verification stages. Abbreviations and technical terms are clearly defined upon initial use. The outcomes indicated that PAUD Waluyo Jati encountered issues in all standards during service implementation. STPPA experienced difficulties utilizing tools to evaluate the growth and development of young children. Compiling a curriculum that takes into account institutional peculiarities presented challenges in the content standard. In terms of the process standard, obstacles arose in preparing RPPM and RPPH. In the assessment standard, issues have arisen regarding the execution of assessments that do not align with the assessment tool. In the education personnel standard, difficulties stem from the compliance with*

*academic qualifications required of teachers. In the facilities and infrastructure standard, limitations are observed in terms of available restrooms and workspace. Financial standards present challenges in raising funds to provide PAUD services, while management practices at PAUD Waluyo Jati suffer from inadequate documentation of program implementation. In light of these difficulties, PAUD Waluyo Jati should strive for continuous improvement in meeting national PAUD standards by preparing activity programmes that comply with these standards.*

**Keywords:** *complexity; PAUD; standard.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesulitan dan upaya yang dihadapi pada penyelenggaraan layanan PAUD dalam perspektif standar nasional PAUD di PAUD Waluyo Jati Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, display data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyelenggaraan layanan PAUD Waluyo Jati mengalami kesulitan dalam setiap standarnya. Pada STPPA ditemukan kesulitan dalam hal penggunaan instrumen untuk melakukan assesment terhadap tumbuh-kembang anak usia dini. Pada standar isi ditemukan kesulitan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kekhasan lembaga. Pada standar proses ditemukan kesulitan dalam penyusunan RPPM dan RPPH. Pada standar penilaian ditemui kesulitan terkait dengan pelaksanaan penilaian yang belum sesuai dengan instrumen penilaian. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan ditemui kesulitan terkait dengan pemenuhan kualifikasi akademik guru. Pada standar sarana dan prasarana ditemui kesulitan berupa keterbatasan toilet dan ruang kerja. Pada standar pembiayaan ditemui kesulitan dalam hal penggalangan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan layanan PAUD. Pada standar pengelolaan ditemui kesulitan pihak guru PAUD Waluyo Jati belum mampu mendokumentasikan setiap pelaksanaan program dengan baik. Berdasarkan kesulitan-kesulitan di atas maka sebaiknya PAUD Waluyo Jati melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam pemenuhan standar nasional PAUD dengan menyusun program kegiatan PAUD yang sesuai dengan standar nasional PAUD.

**Kata kunci:** kompleksitas; PAUD; standar.

## A. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan pada suatu negara akan sangat ditentukan oleh keberhasilan negara dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas. Ini karena layanan pendidikan yang berkualitas akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula (Hopkins, 2015). Bagi suatu lembaga pendidikan, tentu tidaklah mudah untuk mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas. Banyak faktor yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari kualitas *input* (dalam hal ini siswa), kualitas proses (mulai dari kualitas guru, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran pendidikan hingga keandalan kurikulum), dan kualitas *output* serta *outcome* (lulusan yang dihasilkan). Ke semuanya telah menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan dicapai dari keterpaduan antara kualitas input, proses, output dan outcome. Hal itu membuat manajemen mutu terpadu atau *total quality management* (TQM) sebagai pendekatan yang dipandang tepat untuk menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu (Lam et al., 2012).

Dalam implementasi manajemen mutu terpadu, lembaga pendidikan menyelenggarakan layanan pendidikan berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan (Noaman et al., 2017). Standar-standar tersebut merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu. Standar-standar tersebut juga dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan keinginan dan kebutuhan para *stakeholders* pendidikan. Setiap lembaga pendidikan bisa merumuskan dan menetapkan standar. Ini karena tidak ada standar yang bersifat universal ataupun *general* (Sallis, 2014). Namun biasanya standar-standar tersebut dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD dijadikan sebagai *guideline* bagi seluruh lembaga PAUD yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Indonesia, lembaga PAUD menyelenggarakan dua bentuk layanan, yaitu layanan PAUD pada jalur formal dan layanan PAUD pada jalur nonformal. Layanan PAUD pada jalur formal diselenggarakan oleh Taman Kanak-kanak (TK) dan *Raudhatul Athfal* (RA). Sedangkan layanan PAUD pada jalur nonformal diselenggarakan oleh Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD, Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Baik lembaga PAUD pada jalur formal maupun nonformal harus menyelenggarakan layanan PAUD sesuai dengan standar nasional PAUD. Ada delapan standar yang harus dipenuhi, yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA), standar isi, standar proses, standar

penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

STPPA merupakan kriteria minimal yang berhubungan dengan optimalnya tumbuh-kembang anak usia dini dari aspek agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, serta sosial dan emosional. Ke semua aspek perkembangan tersebut harus dicapai berpedoman pada standar isi, standar proses dan standar penilaian. Pencapaian pada STPPA, standar isi, standar proses dan standar penilaian akan sangat dipengaruhi oleh pencapaian pada standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Setiap standar memiliki saling keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika ada satu standar yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan atau pencapaiannya maka akan berpengaruh terhadap pencapaian standar-standar yang lain. Hal itulah yang kemudian memacu adanya kompleksitas dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Standar-standar yang saling berkaitan akan membentuk suatu sistem yang jika sistem itu berjalan dengan baik akan menghasilkan layanan PAUD yang bermutu, namun jika sistem tersebut berjalan kurang baik dapat memunculkan *chaos* dalam penyelenggaraan layanan PAUD (Morrison, 2012).

Diakui ataupun tidak masyarakat menginginkan dan membutuhkan layanan PAUD yang bermutu. Layanan PAUD yang bermutu pada dasarnya merupakan layanan PAUD yang memenuhi standar nasional PAUD. Lembaga PAUD harus memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut karena bagaimanapun juga masyarakat telah menitipkan kepada lembaga PAUD putra-putri mereka untuk dididik. Titipan tersebut pada dasarnya merupakan amanah (Hidayat & Candra, 2017).

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, amanah tersebut harus ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan layanan PAUD yang profesional. Untuk menjaga amanah tersebut maka kepala PAUD sebagai pimpinan lembaga PAUD pun dituntut untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab karena nanti ia akan dimintai pertanggungjawabannya dunia dan di akhirat. Tanggungjawab dalam prinsip manajemen pendidikan Islam merupakan satu prinsip penting dalam membangun manajemen lembaga yang positif. Lepas tangan terhadap tanggungjawab akan melahirkan hasil ketidakpastian program yang ingin dicapai. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya (rakyatnya)” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).

Tentu akan ditemui berbagai kompleksitas dalam mengemban amanah dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Kompleksitas dalam penyelenggaraan layanan PAUD berhubungan dengan konektivitas pada delapan standar nasional PAUD. Kompleksitas dapat menyebabkan ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam pemenuhan standar nasional PAUD (Jess et al., 2011). Kesulitan-kesulitan tersebut akan mendeskripsikan bagaimana suksesi implementasi Permendikbud Nomor 137 tahun 2015 tentang standar nasional PAUD di suatu lembaga PAUD sehingga bisa dinilai bagaimana relevansi antara kebijakan pemerintah tersebut dengan kemampuan suatu lembaga PAUD baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sumber daya non manusianya. Disadari ataupun tidak, di setiap implementasi suatu kebijakan, di dalamnya akan ada kompleksitas (Byrne & Callaghan, 2013).

Hal itulah yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap kompleksitas penyelenggaraan layanan PAUD dalam perspektif standar nasional PAUD dengan memilih PAUD Waluyo Jati sebagai objek kajiannya. Standar-standar yang akan dikaji sisi kompleksitasnya antara lain yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Berdasarkan deskripsi di atas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan dan upaya yang dihadapi pada penyelenggaraan layanan PAUD dalam perspektif standar nasional PAUD di PAUD Waluyo Jati Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Dengan deskripsi tersebut akan diketahui setiap kesulitan yang ada pada masing-masing standar pada standar nasional PAUD, serta diketahui pula penyebabnya dan solusi untuk mengatasi penyebab serta kesulitan-kesulitan tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Overview Manajemen PAUD**

Ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Pertama, penelitian Siti Noor Asiyah yang berjudul “Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD dan PNF di Kutai Kartanegara”. Penelitiannya ditujukan untuk mendeskripsikan pengelolaan PAUD berdasarkan Standar Badan Akreditasi Nasional di Kutai Kartanegara (Standar Tingkat Pencapaian Pengembangan, Standar Isi dan Standar Proses) (Asiah, 2018). Penelitian Asiah dan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang standar nasional PAUD. Perbedaannya adalah jika penelitian Asiah fokus mengkaji standar isi dan

standar proses dari sisi manajemen PAUD, maka penelitian penulis fokus mengkaji delapan standar pada standar nasional PAUD dari sisi kompleksitas penyelenggaraan layanan PAUD.

Kedua, penelitian Devi Sulaeman yang berjudul “Manajemen Satuan PAUD ditinjau dari Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Kelembagaan”. Penelitiannya ditujukan untuk: (1) mengkaji manajemen Satuan Pendidikan PAUD ditinjau dari Standar Manajemen untuk meningkatkan kualitas kelembagaan; (2) mengetahui hasil peningkatan kualitas kelembagaan; menganalisis permasalahan yang dihadapi Kepala Sekolah/Pengelola Unit PAUD dalam pengelolaan Unit PAUD dalam hal Standar Manajemen untuk meningkatkan kualitas kelembagaan; dan (4) mengetahui upaya perbaikan kedepannya yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan PAUD dan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas Kelembagaan (Sulaeman, 2021). Penelitian Sulaeman dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang pencapaian standar nasional PAUD. Perbedaannya adalah penelitian Sulaeman dilakukan analisis terhadap kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan. Sementara penelitian penulis melakukan analisis terhadap kesulitan dalam pencapaian standar nasional PAUD serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Ketiga, penelitian Yussi Ramawati yang berjudul “Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo dengan Standar Nasional.” Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui standar pelayanan di tempat penitipan anak Yayasan Buah Hati (TPA YBH) dan menganalisis kesesuaiannya dengan standar pelayanan nasional (Ramawati, 2016). Penelitian Yussi Ramawati dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang standar nasional PAUD. Perbedaannya adalah Yussi Ramawati menjadikan Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai objek kajiannya, sementara penulis menjadikan Kelompok Bermain (KB) sebagai objek kajiannya.

## **2. Kajian Teori**

### **a. Hakikat Kompleksitas**

Pada kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kompleksitas berasal dari kata kompleks yang berarti himpunan kesatuan dan kelompok. Kompleks juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit dan saling berhubungan. Sedangkan kompleksitas adalah kerumitan dan keruwetan yang dapat mengakibatkan suatu kesulitan (Alwi, 2002).

Konsep kompleksitas seringkali digunakan untuk mengkaji atau menganalisis aktivitas-aktivitas pada suatu organisasi baik dari sisi resiko maupun dari sisi kesulitan-kesulitan dalam beraktivitas (Jensen & Aven, 2018). Konsep kompleksitas juga sering dikaji dan digunakan untuk menghasilkan suatu tugas yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan (Hermes et al., 2009). Analisis tersebut dilakukan untuk mendiagnosa kesulitan dan dicari penyebab serta upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Upaya-upaya yang dihasilkan akan menjadi seperangkat tugas yang digunakan untuk mencapai keberhasilan suatu aktivitas (Wildemuth et al., 2014).

b. Standar Nasional PAUD

Standar dapat diartikan sebagai suatu kriteria minimal yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut mendeskripsikan kebutuhan dan sisi idealisme dari suatu aktivitas (Runco & Jaeger, 2012). Jadi standar nasional PAUD adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD di Indonesia dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Standar nasional PAUD didasari oleh Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009.

Standar nasional PAUD pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 terdiri dari delapan standar, yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan (Fadlillah, 2016).

STPPA merupakan kriteria minimal terkait dengan optimalnya tumbuh kembang anak usia dini dari aspek agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa dan sosial-emosional (Kamelia, 2019). Standar isi mencakup lingkup materi dan kompetensi lulusan. Di dalamnya memuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Standar proses mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Standar penilaian mendeskripsikan tentang penilaian hasil belajar peserta didik. Standar sarana dan prasarana mendeskripsikan berbagai media, alat peraga, fasilitas pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan beserta kompetensinya. Standar pengelolaan mendeskripsikan kegiatan manajerial di lembaga PAUD. Standar pembiayaan mendeskripsikan ketersediaan dan pengaturan penggunaan anggaran di lembaga PAUD (Mulyasana, 2015).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hal itu menjadikan penelitian ini bersifat natural (Moleong, 2010). Penelitian dilakukan di PAUD Waluyo Jati 04 di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Alasan Penulis mengambil lokasi penelitian pada PAUD Waluyo Jati karena kami tertarik dengan penyelenggaraan dan pengelolaan layanan PAUD Waluyo Jati yang telah berdiri 5 tahun tetapi masih mengalami berbagai macam masalah dalam penyesuaian dengan standar PAUD yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dari peristiwa tersebut mengalami kompleksitas didalamnya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesemuanya dilakukan untuk menggali data terkait dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan PAUD di PAUD Waluyo Jati beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian diuji kevalidannya dengan teknik triangulasi sumber data, yaitu dengan cara mempertemukan data yang berasal dari tiga narasumber. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman, yang terdiri dari tahap reduksi data, display data dan verifikasi (Milles et al., 2014). Pada tahap reduksi data dilakukan pemilahan terhadap data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap display data disajikan data yang mengarah pada deskripsi tujuan penelitian. Kemudian pada tahap verifikasi dilakukan upaya analisis dan penyimpulan terhadap data yang telah disajikan.

## 3. Kompleksitas pada Setiap Standar Nasional PAUD di PAUD Waluyo Jati

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan PAUD di PAUD Waluyo Jati belum bisa dilakukan maksimal. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia pada PAUD Waluyo Jati masih menemui kesulitan dalam menyelenggarakan layanan PAUD sesuai dengan standar nasional PAUD, yang terdiri dari STPPA, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan.

Pada STPPA dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 disebutkan bahwa ada lima aspek yang dikembangkan pada anak usia dini, yaitu aspek agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Untuk mengetahui pencapaian dari semua aspek, maka guru dituntut untuk mampu melakukan *assesment* terhadap pencapaian tumbuh-kembang anak usia dini menggunakan berbagai instrumen.



Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terkait dengan STPPA, pihak guru di PAUD Waluyo Jati belum bisa melakukan *assesment* terhadap ketercapaian tingkat pertumbuhan dan perkembangan pada anak dengan menggunakan instrumen seperti Kartu Menuju Sehat (KMS), Tabel BB/TB, alat ukur lingkaran kepala dan DDTK (deteksi, dini tumbuh kembang). Akibatnya guru di PAUD Waluyo Jati belum mampu menginput data di Dapodik terkait dengan pencapaian pertumbuhan (Berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, tinggi badan) dan pencapaian perkembangan anak (nilai moral, fisik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan seni). Penyebabnya adalah karena mereka belum memiliki kemampuan untuk mengisi instrumen tersebut, dimana biasanya pihak dari Puskesmas lah yang bisa mengisinya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah pihak PAUD Waluyo Jati melakukan kerjasama dengan tenaga medis di Puskesmas kecamatan Susukan untuk melakukan analisis terhadap tumbuh-kembang anak usia dini serta menyelenggarakan kegiatan parenting. Kegiatan parenting tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal kemampuan kepada orangtua untuk melakukan analisis terhadap tumbuh-kembang anaknya. Hal itu menjadikan *asessement* tumbuh-kembang anak selain bisa dilakukan oleh guru juga bisa dilakukan oleh orangtua. Kegiatan parenting tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kegiatan *asement* yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak manakala dilakukan secara intensif oleh tenaga profesional (Cooklin et al., 2012).

Standar isi dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 membicarakan penyusunan kurikulum di lembaga PAUD. Dalam kurikulum PAUD dikembangkan tema dan sub tema pembelajaran berdasarkan ciri khas lembaga, karakteristik peserta didik, dan keadaan lingkungan di sekitar lembaga PAUD.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada standar isi, PAUD Waluyo Jati mengalami kesulitan dalam hal penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), terutama kesulitan dalam memasukkan kekhasan yang dimiliki oleh lembaga PAUD. Akibatnya KTSP yang dimiliki oleh PAUD Waluyo Jati sekedar dokumen yang dibuat dengan cara meniru atau mengadopsi dokumen KTSP dari lembaga PAUD lain. Penyebabnya adalah karena para guru belum memiliki pengalaman dalam menyusun kurikulum secara mandiri. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan diskusi dengan guru PAUD lain terkait dengan tips dan trik dalam menyusun KTSP. Berdasarkan hasil diskusi tersebut kemudian guru PAUD Waluyo Jati melakukan studi banding ke PAUD lain untuk mendapatkan bahan perbaikan dalam penyusunan KTSP. Upaya lain untuk mengatasi masalah

kesulitan dalam menyusun KTSP adalah dengan mengirimkan guru untuk mengikuti diklat-diklat kurikulum PAUD yang diselenggarakan oleh pihak kedinasan.

Spirit yang ada pada KTSP adalah kekhasan dari suatu lembaga serta seperangkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kekhasan tersebut akan menjadikan lembaga PAUD berdaya saing, dan pemenuhan terhadap seperangkat kompetensi akan menjadikan lembaga PAUD mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi dapatlah dikatakan kurikulum memegang peranan yang sangat vital dalam mendukung eksistensi suatu lembaga PAUD (Hirst, 2010).

Dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 disebutkan bahwa standar proses mencakup kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang disusun berdasarkan silabus.

#### **4. Evaluasi Penyelenggaraan Layanan PAUD Waluyo Jati**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada standar proses, PAUD Waluyo Jati mengalami kesulitan dalam hal penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), dan kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian. Guru masih belum mampu membuat RPPM dan RPPH yang memiliki kesesuaian dengan silabus dan tema pembelajaran. Akibatnya RPPM dan RPPH dari tahun ke tahun mengalami kesamaan, padahal dari hasil observasi dapat diketahui bahwa kondisi dan karakteristik peserta didik setiap tahunnya berbeda-beda. Penyebabnya adalah karena guru belum memiliki kemampuan untuk menyusun RPPM maupun RPPH secara mandiri. Selain itu guru juga cenderung lebih suka meng-*copypaste* RPPM dan RPPH dari lembaga PAUD lain.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di atas adalah dengan mengirimkan guru untuk mempelajari RPPM, RPPH dan instrumen penilaian pada lembaga PAUD lain, kemudian memodifikasinya sesuai dengan karakteristik peserta didik di PAUD Waluyo Jati. Untuk mendukung hal tersebut, guru di PAUD Waluyo Jati juga dikirim untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran yang diadakan oleh pihak kedinasan. Nampaknya pihak pengelola PAUD Waluyo Jati menjadikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak kedinasan sebagai modal utama untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan layanan PAUD.

Pelatihan-pelatihan pendidikan bagi guru PAUD Waluyo Jati bukan hanya dapat meningkatkan mutu guru, tetapi juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Ini karena pelatihan-pelatihan pendidikan bagi guru dapat merubah cara pandang guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran baik dari sisi penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga pada penyusunan instrumen pembelajaran. Hal itu yang kemudian akan mengantarkan guru pada produktivitas kerja (Harris & Sass, 2011).

Pada standar penilaian dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 disebutkan bahwa kegiatan penilaian harus dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur tumbuh-kembang anak dengan baik. Mekanisme penilaian dilakukan dengan menyusun dan menyepakati instrumen, melaksanakan penilaian sesuai dengan instrumen, kemudian mendokumentasikan dan melaporkan hasil penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terkait dengan standar penilaian, guru di PAUD Waluyo Jati mengalami kesulitan dalam hal relevansi antara instrumen penilaian dengan pelaksanaan kegiatan penilaian. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa seringkali pelaksanaan kegiatan penilaian berjalan tidak sesuai dengan instrumen penilaian. Akibatnya guru mengalami kesulitan dalam menyusun laporan penilaian. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian antara instrumen dengan pelaksanaan dikarenakan keadaan kelas yang tidak selalu kondusif untuk melakukan penilaian. Kemudian berdasarkan hasil dokumentasi penelitian dapat diketahui bahwa pada dasarnya kesulitan dalam menyusun laporan penilaian karena keterbatasan dokumen yang dihasilkan dari proses penilaian itu sendiri.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah kepala PAUD Waluyo Jati menginstruksikan agar guru melakukan kegiatan penilaian secara berkala bersamaan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Istilah lainnya adalah penilaian *by process*. Model penilaian *by process* pada dasarnya dilakukan untuk mengakomodir berbagai situasi dan kondisi yang tidak bisa diprediksi selama kegiatan penilaian berlangsung (Menix, 2007).

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 disebutkan bahwa guru PAUD harus berkualifikasi S1 PGPAUD atau S1 Psikologi Perkembangan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD Waluyo Jati mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kualifikasi akademik guru PAUD, yaitu S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) atau S1 Psikologi Perkembangan. Penyebabnya karena keterbatasan alumni PGPAUD yang ada di desa Gumelem kecamatan Susukan. Minat alumni PGPAUD untuk melamar kerja di PAUD Waluyo Jati juga masih rendah. Hasil dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa kepala

PAUD dan guru PAUD Waluyo Jati Gumelem berpendidikan terakhir SLTA. Akibatnya hasil penilaian akreditasi menjadi kurang maksimal. Hal itu berdampak pula terhadap lemahnya kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dan dampak dari kesulitan di atas adalah dengan mengirimkan guru-guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan yang diselenggarakan baik oleh HIMPAUDI maupun oleh pihak kedinasan. Kepala PAUD Waluyo Jati dan yayasan juga memberikan izin belajar bagi guru yang mau melanjutkan studi di S1 PGPAUD.

Diakui ataupun tidak, kualifikasi akademik guru akan memberikan pengaruh terhadap profesionalisme guru. Itulah sebab untuk menjadi guru yang profesional langkah awalnya adalah memenuhi kualifikasi akademik sebagai guru (Alamsyah et al., 2020). Kualifikasi akademik guru juga akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan belajar peserta didik dan hasil belajar peserta didik (Susanti et al., 2020). Melihat hasil penelitian nampaknya kepala PAUD Waluyo Jati ke depan harus mempertimbangkan terkait dengan kualifikasi akademik guru ketika melakukan rekrutmen guru baru. Hal itu merupakan cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah belum tercapainya kualifikasi akademik guru PAUD.

Pada standar sarana dan prasarana dijelaskan bahwa dalam Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 lembaga PAUD harus memiliki: (1) jumlah ruang dan luas lahan yang disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m<sup>2</sup>; (2) ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar; (3) fasilitas cuci tangan dengan air bersih; (4) kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan; (5) fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; (6) Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar; (7) kamar mandi yang mudah dijangkau anak air bersih, aman, dan sehat bagia anak; (8) fasilitas permainan dalam dan luar ruangan yang aman dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kesulitan yang dihadapi oleh PAUD Waluyo Jati dalam hal standar sarana dan prasarana adalah keterbatasan jumlah toilet. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hanya ada satu toilet yang tersedia dan digunakan oleh guru serta peserta didik. Selain itu PAUD Waluyo Jati hanya memiliki satu ruang kantor yang digunakan oleh kepala PAUD dan guru PAUD. Akibatnya kerja yang dilakukan oleh kepala PAUD dan guru PAUD kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak. Penyebab dari masalah tersebut adalah karena luas lahan yang kurang dan terbatasnya anggaran belanja sarana dan prasarana.

Upaya yang digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di atas adalah dengan mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada pihak Pemerintahan Desa dan pihak kedinasan. Selain itu, pihak kepala PAUD Waluyo Jati juga mengajukan bantuan pengadaan sarana dan prasarana kepada perusahaan-perusahaan dan para donatur di lingkungan sekitar lembaga PAUD.

Diakui ataupun tidak, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada suatu lembaga PAUD dapat memberikan pengaruh pada aktivitas belajar peserta didiknya. Ini karena peserta didik akan belajar dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana juga akan memberikan pengaruh terhadap terciptanya iklim lingkungan PAUD yang kondusif untuk melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar. Untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan sebaiknya kepala PAUD memaksimalkan peran serta wali murid dari sisi pembiayaan pendidikan. Upaya tersebut akan bisa dilakukan dengan baik ketika wali murid memiliki rasa saling memiliki terhadap lembaga PAUD (Berlinski & Galiani, 2007).

Kemudian pada standar pembiayaan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan layanan PAUD didukung oleh ketersediaan biaya operasional dan biaya personal. Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian dapat diketahui bahwa biaya operasional di PAUD Waluyo Jati digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan SDM, biaya pendidikan peserta didik, dan bahan pendidikan habis pakai. Biaya operasional bersumber dari dana BOP, daftar ulang dan SPP. Namun dari ketiganya, pihak PAUD Waluyo Jati lebih banyak mengandalkan dana BOP dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Inilah yang menjadi masalah dan kesulitan dari sisi standar pembiayaan. Padahal pencairan BOP sering mengalami kendala. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada sisi yang lain wali murid juga seringkali terlambat dalam membayar SPP. Akibatnya penggajian bagi guru terkadang mengalami keterlambatan, penyelenggaraan layanan PAUD bagi peserta didik juga menjadi kurang maksimal dilakukan karena minimnya anggaran yang menyokong pelaksanaannya. Diakui ataupun tidak, ketersediaan anggaran pendidikan merupakan hal utama yang harus ada dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas kemudian kepala PAUD menjalin relasi dengan para donatur agar mau menginfakkan sebagian rizkinya ke lembaga PAUD, menjual Alat Permainan Edukatif (APE) yang dihasilkan oleh guru dan anak, serta menganjurkan kepada wali murid agar tidak terlambat dalam membayar SPP dan daftar ulang. Agar pihak wali murid tidak keberatan

dalam membayar daftar ulang, pihak PAUD meminta kepada wali murid untuk membayarnya dengan cara diangsur. *Stakeholders* pendidikan pada PAUD Waluyo Jati harus menyadari bahwa penyelenggaraan layanan PAUD yang prima pada dasarnya didapat dari ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai, dan wali murid menjadi pihak yang paling menentukan dalam pemenuhan anggaran tersebut (Wiyani, 2020).

Kemudian pada standar pengelolaan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan layanan PAUD dilakukan melalui kegiatan perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program dan pengawasan program. Program tersebut mengacu pada standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan.

Untuk memastikan bahwa program telah dilaksanakan, pihak lembaga PAUD harus mampu menunjukkan dokumen-dokumen pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pihak guru PAUD Waluyo Jati belum mampu mendokumentasikan setiap pelaksanaan program dengan baik. Hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengarsipan serta keterbatasan kompetensi manajerial dari kepala PAUD. Untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan pengarsipan, kepala PAUD menunjuk seorang guru untuk fokus dalam penyelesaian kegiatan administrasi, terutama yang berhubungan dengan penyusunan laporan kegiatan PAUD.

Kepala PAUD memiliki peran yang sangat vital dalam pemenuhan standar nasional PAUD. Sebagai *leader* sekaligus manajer, kepala PAUD dituntut untuk mampu melakukan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan tersebut dilakukan melalui pemberian izin belajar untuk studi lanjut, pelaksanaan *in house training*, mengikutsertakan guru sebagai peserta pelatihan-pelatihan, dan melakukan kegiatan supervisi akademik serta supervisi klinis. Untuk melakukan kegiatan pengembangan secara optimal, kepala PAUD harus mampu melakukan kerjasama dengan pengawas PAUD dan pihak yayasan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk menghasilkan guru PAUD yang profesional, meskipun mereka belum memenuhi kualifikasi akademik S1 PGPAUD. Profesionalisme guru PAUD dapat berimplikasi pada pemenuhan STPPA, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Kepala PAUD juga seyogyanya mengikuti suatu organisasi di luar lembaga, baik itu organisasi profesi seperti HIMPAUDI dan organisasi yang lain. Keikutsertaan dan keaktifan kepala PAUD dalam mengikuti organisasi tersebut dapat menguatkan kompetensi manajerial, kompetensi sosial, dan kompetensi kewirausahaannya. Kuatnya kompetensi manajerial pada kepala PAUD akan mampu mengantarkannya memenuhi standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana dan standar pengelolaan. Kuatnya kompetensi manajerial, kompetensi sosial dan

kompetensi kewirausahaan juga akan menjadikan kepala PAUD kreatif dalam menyelenggarakan layanan PAUD. Kreativitas tersebut dapat menghasilkan inovasi, di mana dengan inovasi akan dihasilkan perubahan-perubahan yang mendukung terciptanya iklim lembaga PAUD yang kondusif dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (Mun et al., 2017).

Berdasarkan kesulitan-kesulitan di atas maka sebaiknya PAUD Waluyo Jati melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam pemenuhan standar nasional PAUD dengan menyusun program kegiatan PAUD yang sesuai dengan standar nasional PAUD. Program kerja tersebut juga harus dipastikan menyentuh setiap standar yang ada di dalam standar nasional PAUD, mulai dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Kemudian setiap kesulitan yang ada pada setiap standar dijadikan sebagai program berskala prioritas.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan kesulitan pada setiap standar, mulai dari STPPA, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Pada STPPA ditemukan kesulitan dalam hal penggunaan instrumen untuk melakukan assesment terhadap tumbuh-kembang anak usia dini. Pada standar isi ditemukan kesulitan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kekhasan lembaga. Pada standar proses ditemukan kesulitan dalam penyusunan RPPM dan RPPH. Pada standar penilaian ditemui kesulitan terkait dengan pelaksanaan penilaian yang belum sesuai dengan instrumen penilaian. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan ditemui kesulitan terkait dengan pemenuhan kualifikasi akademik guru. Pada standar sarana dan prasarana ditemui kesulitan berupa keterbatasan toilet dan ruang kerja. Pada standar pembiayaan ditemui kesulitan dalam hal penggalangan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan layanan PAUD. Pada standar pengelolaan ditemui kesulitan pihak guru PAUD Waluyo Jati belum mampu mendokumentasikan setiap pelaksanaan program dengan baik. Kesulitan-kesulitan tersebut pada dasarnya berpangkal dari kualitas sumber daya manusia, khususnya kepala PAUD dan guru yang belum berstandar, khususnya dari sisi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah sebabnya, perlu dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia yang optimal untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi standar nasional PAUD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M., Ahmad, S., & Harris, H. (2020). Pengaruh Kualifikasi Akademik dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru. *Journal of Education Research*, *1*(3), 1830187. <https://doi.org/10.37985/joe.v1i3.19>
- Alwi, H., dkk. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Asiah, S. N. (2018). Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD dan PNF di Kutai Kartanegara. *Syamil: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, *6*(1). <https://doi.org/10.21093/sy.v6i1.1325>
- Berlinski, S., & Galiani, S. (2007). The effect of a large expansion of pre-primary school facilities on preschool attendance and maternal employment. *Labour Economics*, *14*(3), 665–680. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2007.01.003>
- Byrne, D., & Callaghan, G. (2013). *Complexity Theory and the Social Sciences* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203519585>
- Cooklin, A. R., Giallo, R., & Rose, N. (2012). Parental fatigue and parenting practices during early childhood: An Australian community survey: Parental fatigue during early parenting. *Child: Care, Health and Development*, *38*(5), 654–664. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01333.x>
- Fadlillah, M. (2016). Komparasi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 dalam Pembelajaran PAUD. *JURNAL INDRIA (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Awal)*, *1*(1).
- Harris, D. N., & Sass, T. R. (2011). Teacher training, teacher quality and student achievement. *Journal of Public Economics*, *95*(7–8), 798–812. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.009>
- Hermes, P., Mulder, M., van Paassen, M. M., Boering, J. H. L., & Huisman, H. (2009). Solution-Space-Based Complexity Analysis of the Difficulty of Aircraft Merging Tasks. *Journal of Aircraft*, *46*(6), 1995–2015. <https://doi.org/10.2514/1.42886>
- Hidayat, R., & Candra, W. (2017). *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. LPPPI.
- Hirst, P. H. (2010). *Knowledge and the Curriculum (International Library of the Philosophy of Education Volume 12)* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861127>
- Hopkins, D. (2015). *Improving the Quality of Education for All* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315068756>
- Jensen, A., & Aven, T. (2018). A new definition of complexity in a risk analysis setting. *Reliability Engineering & System Safety*, *171*, 169–173. <https://doi.org/10.1016/j.res.2017.11.018>
- Jess, M., Atencio, M., & Thorburn, M. (2011). Complexity theory: Supporting curriculum and



- pedagogy developments in Scottish physical education. *Sport, Education and Society*, 16(2), 179–199. <https://doi.org/10.1080/13573322.2011.540424>
- Kamelia, N. (2019). Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak) di RA Harapan Bangsa Maguwoharjo Condong Catur Yogyakarta. *Kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 2(2), 112. <https://doi.org/10.24014/kjiece.v2i2.9064>
- Lam, S., Lee, V., Ooi, K., & Phusavat, K. (2012). A structural equation model of TQM, market orientation and service quality. *Managing Service Quality: An International Journal*, 22(3), 281–309. <https://doi.org/10.1108/09604521211230996>
- Menix, K. D. (2007). Evaluation of Learning and Program Effectiveness. *The Journal of Continuing Education in Nursing*, 38(5), 201–208. <https://doi.org/10.3928/00220124-20070901-05>
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Source Book* (3rd ed.). Sage.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Morrison, K. (2012). *School Leadership and Complexity Theory* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203603512>
- Mulyasana, D. (2015). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Rosda.
- Mun, K., Mun, J., Hwang, Y., & Kim, S.-W. (2017). Changes in High School Students' Creative Leader Competency through STEAM R&E. *Journal of The Korean Association For Science Education*, 37(5), 825–833. <https://doi.org/10.14697/JKASE.2017.37.5.825>
- Noaman, A. Y., Ragab, A. H. M., Madbouly, A. I., Khedra, A. M., & Fayoumi, A. G. (2017). Higher education quality assessment model: Towards achieving educational quality standard. *Studies in Higher Education*, 42(1), 23–46. <https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1034262>
- Ramawati, Y. (2016). Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan tempa penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo dengan Standar Nasional. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 7(2), 79–99. <https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.505>
- Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The Standard Definition of Creativity. *Creativity Research Journal*, 24(1), 92–96. <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203417010>
- Sulaeman, D. (2021). Manajemen Satuan PAUD ditinjau dari Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Kelembagaan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 458–462. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1112>

- Susanti, S., Fitria, H., & Puspita, Y. (2020). Pengaruh Kualifikasi Akademik dan Kinerja Guru Terhadap Nilai Siswa. *Journal of Education Research*, 1(2), 139–145. <https://doi.org/10.37985/joe.v1i2.13>
- Wildemuth, B., Freund, L., & G. Toms, E. (2014). Untangling search task complexity and difficulty in the context of interactive information retrieval studies. *Journal of Documentation*, 70(6), 1118–1140. <https://doi.org/10.1108/JD-03-2014-0056>
- Wiyani, N. A. (2020). Menciptakan Layanan PAUD yang Prima Melalui Penerapan Praktik Activity Based Costing. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(2), 175–186. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.2.175>